



OLIGARKI POLITIK

DALAM PEMILU



Dr. Carlos Maia

Dr. Carlos Maia

OLIGARKI POLITIK DALAM PEMILU



OLIGARKI POLITIK DALAM PEMILU

Penulis: Dr. Carlos Maia

Penyunting: Fariz Fawwaz Ramadhan

Penata isi: Sunlivia

Perancang Sampul: Sunlivia

Cetakan Pertama, April 2026

ISBN 978-602-6780-81-2

186 hlm.; 14,5 x 21 cm

Diterbitkan Oleh

INFINITE PUBLISHER

Jlatren Mancasan, RT.6/RW.23, Jlatren, Jogotirto, Kec. Berbah,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55572

Email: isbn.infinitepublisher@gmail.com

Telp: +62 813-9060-0052

Website: infinitepublisher.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin dari Penerbit

Kata Pengantar

Pemilu selalu dipahami sebagai jantung demokrasi, karena melalui mekanisme itulah mandat rakyat diterjemahkan menjadi kekuasaan yang sah. Namun dalam praktiknya, pemilu tidak pernah benar-benar steril dari persaingan sumber daya, jaringan kepentingan, dan logika ekonomi-politik yang bekerja di belakang prosedur formal. Buku ini hadir untuk menjelaskan bagaimana oligarki dapat tumbuh, beradaptasi, dan bahkan menguat melalui kontestasi elektoral yang tampak kompetitif, tetapi sering kali tidak setara. Dengan pendekatan yang tegas namun tetap mudah dipahami, pembaca diajak melihat pemilu bukan sekadar “siapa menang”, melainkan “bagaimana kemenangan itu diproduksi” dan “siapa yang paling diuntungkan.”

Ketika informasi tidak terbuka, pengawasan melemah, dan ruang transaksi melebar, maka demokrasi prosedural dapat terus berjalan sembari demokrasi substantif mengalami erosi secara perlahan. Karena itu, buku ini tidak berhenti pada kritik, tetapi juga membangun kerangka analisis yang sistematis untuk memahami akar masalah, pola kerja oligarki, serta konsekuensinya terhadap kebijakan publik, integritas pemilu, dan kualitas perwakilan. Harapannya, buku ini menjadi rujukan akademik sekaligus bahan refleksi publik untuk memperkuat demokrasi yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih bertanggung jawab.

Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB 1 Memahami Oligarki Politik dan Kontestasi Elektoral	7
1.1 Definisi Oligarki, Elite, dan Kekuasaan.....	8
1.2 Mengapa Pemilu Menjadi Arena Oligarki.....	10
1.3 Tujuan, Pertanyaan Kunci, dan Ruang Lingkup Buku	13
1.4 Metode Analisis, Data, dan Etika Penulisan	15
BAB 2 Sejarah dan Genealogi Oligarki di Indonesia	18
2.1 Dari Orde Lama ke Orde Baru: Konsolidasi Elite	19
2.2 Reformasi, Demokratisasi, dan Adaptasi Oligarki	21
2.3 Desentralisasi dan Fragmentasi Oligarki Lokal	23
2.4 Pelajaran dari Krisis Ekonomi dan Transisi Politik	25
BAB 3 Ekonomi Politik Pemilu: Uang, Bisnis, dan Kekuasaan 28	
3.1 Biaya Politik dan Sumber Pembiayaan	29
3.2 Hubungan Pengusaha dan Elite Politik.....	31
3.3 Praktik Patronase dan Klientelisme.....	33
3.4 Ekonomi Bayangan: Broker, Konsultan, dan Perantara.....	35
BAB 4 Partai Politik sebagai Gerbang Oligarki	38
4.1 Rekrutmen Kandidat dan Seleksi Internal	39
4.2 Mahar Politik dan Transaksi Pencalonan	42
4.3 Oligarki dalam Struktur Kepengurusan Partai.....	43

4.4 Kaderisasi, Demokrasi Internal, dan Jalan Keluar	45
BAB 5 Desain Sistem Pemilu dan Celah Oligarkis	48
5.1 Sistem Proporsional Terbuka dan Kompetisi Intra-Partai.....	50
5.2 Ambang Batas, Dapil, dan Penyederhanaan yang Menguntungkan Elite	52
5.3 Aturan Kampanye, Dana Kampanye, dan Transparansi	54
5.4 Reformasi Sistem: Pilihan dan Konsekuensi	57
BAB 6 Pembiayaan Politik dan Rezim Dana Kampanye	60
6.1 Sumber Dana: Donasi, Sumbangan, dan Penggalangan	61
6.2 Pelaporan Dana Kampanye: Kelemahan dan Manipulasi.....	64
6.3 <i>Dark Money</i> dan Pencucian Dana Politik.....	66
6.4 Model Pembiayaan Publik dan Pembatasan Donasi.....	68
BAB 7 Politik Uang, Klientelisme, dan Mesin Lapangan.....	70
7.1 Vote Buying: Bentuk, Modus, dan Rasionalitas.....	71
7.2 Patronase dan Jaringan Penghubung (<i>Brokers</i>)	74
7.3 Distribusi Bantuan, Program, dan Penyalahgunaan	77
7.4 Strategi Pencegahan dan Penegakan	79
BAB 8 Oligarki Media: Kepemilikan, Agenda, dan Framing....	83
8.1 Konsentrasi Media dan Konflik Kepentingan	84
8.2 Propaganda Halus: Framing, Narasi, dan <i>Spin</i>	86
8.3 Iklan Politik, Survei, dan <i>Manufacturing Consent</i>	88
8.4 Literasi Media dan Regulasi yang Efektif.....	90
BAB 9 Data, Teknologi, dan Oligarki Digital.....	94
9.1 Ekonomi Influencer dan Buzzer Industri	95

9.2 Microtargeting, Big Data, dan Privasi Pemilih	97
9.3 Disinformasi, <i>Deepfake</i> , dan Manipulasi Emosi	100
9.4 Tata Kelola Platform dan Kewajiban Transparansi	102
BAB 10 Politik Identitas, Polarisasi, dan Instrumentalisasi Isu	106
10.1 Agama, Etnisitas, dan Identitas sebagai Komoditas Politik.	107
10.2 Polarisasi dan Politik Ketakutan	109
10.3 Mobilisasi Massa, Ormas, dan <i>Street Politics</i>	111
10.4 Membangun Narasi Kebangsaan yang Inklusif	114
BAB 11 Dinasti Politik dan Oligarki Lokal	117
11.1 Genealogi Dinasti: Dari Lokal ke Nasional	118
11.2 <i>Incumbency Advantage</i> dan Akses Sumber Daya	120
11.3 Peran Pengusaha Lokal dan Jaringan Patronase	122
11.4 Strategi Memperkuat Meritokrasi di Daerah	124
BAB 12 Institusi Negara dan Pembajakan Kebijakan	127
12.1 Legislasi, Lobi, dan Perdagangan Pengaruh	128
12.2 Birokrasi, Aparat, dan Netralitas Pemilu	130
12.3 Pengadaan, Proyek, dan Politik Anggaran	132
12.4 Kebijakan Publik sebagai <i>Spoils System</i> vs Kepentingan Umum	135
BAB 13 Hukum Pemilu, Pengawasan, dan Penegakan	138
13.1 KPU, Bawaslu, DKPP: Mandat dan Tantangan	139
13.2 Sengketa Hasil, Peradilan, dan Politik Hukum	141
13.3 Antikorupsi dan Kejahatan Pemilu	144
13.4 Reformasi Penegakan: <i>Evidence-Based Enforcement</i>	146

BAB 14 Perlawanan Demokratis: Civil Society dan Pengawasan Warga	150
14.1 Jurnalisme Investigasi dan Perlindungan Kebebasan Pers	151
14.2 Akademisi, LSM, dan Gerakan Pemantau Pemilu	153
14.3 Transparansi Anggaran dan Open Data.....	155
14.4 Pendidikan Politik Warga dan Etika Pemilih	157
BAB 15 Agenda Masa Depan: Mengurangi Cengkeraman Oligarki	160
15.1 Roadmap Reformasi: Partai, Dana Kampanye, dan Sistem Pemilu.....	161
15.2 Teknologi untuk Transparansi: Audit, Traceability, dan AI	164
15.3 Merawat Demokrasi Substantif: Keadilan Sosial dan Integritas	166
15.4 Kesimpulan Operasional: Rekomendasi Kebijakan dan Aksi	168
Penutup	172
Daftar Pustaka.....	173
Profil Penulis	Error! Bookmark not defined.

Daftar Gambar

Gambar 1 Surat Suara sebagai Arena Kontestasi: ketika akses sumber daya memengaruhi peluang dan hasil kompetisi elektoral.	11
Gambar 2 foto suasana kongres	39
Gambar 3 foto proses/simulasi penghitungan suara dan formulir rekap.....	49
Gambar 4 Simbol Insentif Finansial dalam Politik: uang sebagai pemicu asimetri informasi dan konflik kepentingan dalam kontestasi.....	62
Gambar 5 foto kerumunan aksi/protes di ruang publik (mobilisasi).	118
Gambar 6 Ruang legislasi sebagai arena tawar-menawar kebijakan	128

BAB 1 Memahami Oligarki Politik dan Kontestasi Elektoral

┌ *“Tanpa transparansi, tidak akan ada akuntabilitas.”*

Pemilu sering dipahami sebagai mekanisme demokrasi yang memberi setiap warga kesempatan setara untuk menentukan arah kekuasaan. Namun, pada praktiknya, pemilu juga dapat berubah menjadi arena kompetisi yang sangat mahal, berisiko tinggi, dan sarat pertarungan sumber daya. Di titik inilah oligarki politik yakni konsentrasi pengaruh pada segelintir aktor yang menguasai modal, jaringan, dan akses institusi sering hadir secara halus tetapi menentukan. Bab ini menempatkan pembaca pada pijakan konseptual agar mampu membaca pemilu bukan hanya sebagai prosedur elektoral, melainkan juga sebagai medan pertukaran kepentingan yang menyentuh urusan kebijakan publik.

Dalam kerangka tata kelola publik modern, akuntabilitas tidak berhenti pada pelaporan administratif, melainkan mencakup kewajiban untuk menjelaskan, membenarkan, serta menerima konsekuensi atas penggunaan kewenangan. Akuntabilitas selalu membutuhkan informasi yang terbuka, karena ketertutupan melahirkan ruang gelap yang mudah dieksploitasi oleh kepentingan sempit melalui manipulasi aturan, pengaruh kebijakan, dan pembajakan agenda publik. Literatur tata kelola menekankan bahwa

BAB 2 Sejarah dan Genealogi Oligarki di Indonesia

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
Lord Acton

Sejarah oligarki di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai daftar tokoh, partai, atau peristiwa politik yang silih berganti. Ia bekerja lebih halus sebagai “pola hubungan” yang menetapkan siapa memperoleh akses, siapa menentukan keputusan, dan siapa menanggung konsekuensi. Dalam pola itu, pemilu sering tampak sebagai ajang kompetisi terbuka, tetapi di baliknya tersimpan struktur sumber daya yang timpang dan tidak setara. Karena itulah, bab ini mengajak pembaca melihat oligarki sebagai proses historis yang berkembang melalui konsolidasi, adaptasi, fragmentasi, dan pembelajaran dari krisis.

Untuk menelaah genealogi oligarki secara lebih tajam, pendekatan yang dipakai dalam bab ini menautkan sejarah politik dengan logika tata kelola publik. Ketika akuntabilitas dan transparansi lemah, maka asimetri informasi, konflik kepentingan, dan *moral hazard* menjadi “mesin sosial” yang memungkinkan kekuasaan terkonsentrasi tanpa koreksi publik yang memadai. Dalam literatur tata kelola, jurang antara *law on the books* dan *law in action* adalah salah satu penjelasan paling kuat tentang mengapa

BAB 3 Ekonomi Politik Pemilu: Uang, Bisnis, dan Kekuasaan

“Sunlight is said to be the best of disinfectants.” Louis D. Brandeis

Pemilu secara normatif diletakkan sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan yang sah, kompetitif, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Namun dalam praktiknya, pemilu juga merupakan arena ekonomi politik yang sarat transaksi, karena kekuasaan selalu beririsan dengan akses sumber daya, jejaring bisnis, dan pengaruh kebijakan. Di titik ini, uang tidak sekadar menjadi alat kampanye, melainkan berubah menjadi “infrastruktur politik” yang menentukan siapa bisa maju, siapa bisa bertahan, dan siapa akhirnya menang. Karena itu, Bab 3 ini menempatkan pemilu sebagai ruang kontestasi kepentingan, bukan hanya kompetisi gagasan, sebagaimana arah pembahasan Bab 3 dalam kerangka buku ini.

Kerangka analisis utama bab ini bertumpu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sektor publik yang menekankan bahwa kekuasaan harus dapat diawasi melalui keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, serta mekanisme koreksi yang efektif. Transparansi dipahami sebagai prasyarat minimal akuntabilitas, sebab tanpa informasi yang cukup, publik tidak memiliki dasar

BAB 4 Partai Politik sebagai Gerbang Oligarki

“*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.*” Lord Acton

Partai politik seharusnya menjadi jembatan antara kehendak warga dan kebijakan negara, sekaligus mesin kaderisasi yang melahirkan pemimpin publik berintegritas. Namun dalam praktik demokrasi elektoral modern, partai kerap berubah menjadi ruang *gatekeeping* yang menentukan siapa dapat masuk gelanggang kompetisi, dengan standar yang tidak selalu transparan dan tidak selalu berbasis merit. Ketika proses internal partai lebih dipengaruhi kalkulasi uang, popularitas instan, atau kedekatan dengan lingkaran elite, maka partai tidak lagi berfungsi sebagai institusi representasi, melainkan sebagai pintu seleksi yang memperkuat konsentrasi kuasa. Pada titik inilah pembacaan oligarki tidak cukup berhenti pada kandidat atau pemilih, melainkan harus menelusuri struktur dan mekanisme internal partai sebagai “gerbang” utama yang membentuk kualitas demokrasi.

Untuk membaca partai sebagai gerbang oligarki, kerangka akuntabilitas dan transparansi menjadi alat analitis yang sangat penting, karena keduanya menentukan apakah kekuasaan dapat dimintai jawaban secara terbuka (*answerability*) atau justru

BAB 5 Desain Sistem Pemilu dan Celah Oligarkis

*“Institutions are the rules of the game in a society.”
Douglass C. North*

Desain sistem pemilu pada dasarnya bukan sekadar “teknik” untuk menghitung suara dan membagi kursi, melainkan perangkat institusional yang menentukan siapa yang punya peluang menang, siapa yang mudah tersingkir, serta siapa yang paling diuntungkan ketika kompetisi politik berubah menjadi kompetisi sumber daya. Ketika sistem pemilu menuntut biaya tinggi dan mengandalkan popularitas instan, kandidat yang memiliki akses modal besar akan lebih mudah menembus pintu kekuasaan dibandingkan kandidat yang kuat secara kapasitas namun minim dukungan finansial. Dalam situasi seperti itu, pemilu tetap berlangsung secara prosedural, tetapi substansinya rawan dibajak oleh logika oligarkis yang mengubah mandat rakyat menjadi komoditas politik. Karena itu, membahas desain pemilu berarti membahas arsitektur kekuasaan yang dapat memperkuat demokrasi atau justru menormalisasi dominasi elite.

BAB 6 Pembiayaan Politik dan Rezim Dana Kampanye

tanpa  *“Tanpa transparansi, tidak akan ada akuntabilitas, dan akuntabilitas, transparansi tidak ada artinya.”*

Pembiayaan politik adalah urat nadi dari kontestasi elektoral modern, tetapi pada saat yang sama ia juga menjadi pintu masuk paling rentan bagi dominasi oligarki. Ketika biaya kampanye meningkat, kandidat dan partai terdorong mencari sumber daya di luar basis dukungan ideologis maupun iuran anggota, sehingga relasi politik cenderung bergeser menjadi relasi transaksi. Dalam situasi seperti ini, pemilu tidak lagi hanya dipahami sebagai kompetisi gagasan, melainkan kompetisi modal yang menentukan siapa sanggup bertahan sampai hari pemungutan suara. Oleh karena itu, pembahasan tentang dana kampanye sesungguhnya adalah pembahasan tentang struktur kekuasaan, karena uang bukan sekadar alat, melainkan juga mekanisme kontrol.

Bab ini menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prasyarat utama untuk memahami persoalan dana kampanye secara utuh, bukan sekadar isu administratif pelaporan. Dalam perspektif tata kelola publik, relasi antara penyumbang, kandidat, partai, dan regulator membentuk ekosistem yang memproduksi insentif, peluang penyimpangan, serta celah manipulasi. Ketika terdapat

AB 7 Politik Uang, Klientelisme, dan Mesin Lapangan

“When buying and selling are controlled by legislation, the first things bought and sold are legislators.” P. J. O’Rourke

Demokrasi elektoral modern selalu membawa janji kesetaraan politik, tetapi di banyak tempat ia juga memunculkan paradoks yang sulit dihindari: kompetisi yang terbuka justru mendorong biaya politik yang tinggi, dan biaya itu sering “dibayar” lewat praktik transaksional di level akar rumput. Dalam konteks Indonesia, relasi antara uang, jaringan sosial, dan struktur kekuasaan tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dalam ekosistem yang menghubungkan kandidat, partai, donatur, broker, hingga pemilih. Karena itu, politik uang dan klientelisme bukan sekadar persoalan moral individu, melainkan mekanisme yang ikut membentuk pasar politik, memengaruhi kualitas representasi, dan menentukan arah kebijakan publik. Bab ini ditempatkan sebagai jembatan penting untuk memahami bagaimana oligarki bekerja bukan hanya di ruang elite, tetapi juga dalam kerja-kerja lapangan yang paling konkret.

Jika bab sebelumnya memetakan pembiayaan politik dan rezim dana kampanye, maka bab ini memperlihatkan bagaimana “aliran biaya” itu diterjemahkan menjadi strategi mobilisasi yang mengandalkan distribusi material, loyalitas personal, dan penataan

BAB 8 Oligarki Media: Kepemilikan, Agenda, dan Framing

“A *popular government, without popular information, or the means of acquiring it, is but a Prologue to a Farce or a Tragedy.*” James Madison

Media dalam demokrasi sering diposisikan sebagai ruang publik yang memungkinkan warga menilai kekuasaan secara rasional, kritis, dan berbasis informasi. Namun pada saat yang sama, media juga merupakan industri yang hidup dari modal, jejaring ekonomi, dan kalkulasi pengaruh, sehingga ia tidak pernah sepenuhnya steril dari relasi kepentingan. Di sinilah pemilu menjadi momen paling menentukan, karena informasi yang beredar bukan hanya membentuk persepsi, tetapi dapat mengarahkan pilihan politik, menormalisasi ketimpangan, dan bahkan mengunci hasil kontestasi dalam batas narasi tertentu. Ketika kepemilikan media terkonsentrasi dan bertemu dengan ambisi kekuasaan, maka yang lahir bukan sekadar pemberitaan, melainkan “arsitektur pengaruh” yang bekerja melalui seleksi isu, penonjolan sudut pandang, dan pengaburan fakta yang tidak menguntungkan.

Kerangka akuntabilitas dan transparansi sektor publik memberikan lensa penting untuk membaca persoalan ini, karena media seharusnya menjadi bagian dari ekosistem pengawasan

seremonial. Kajian mengenai tantangan literasi digital menegaskan perlunya strategi yang terukur untuk mendukung tata kelola digital, termasuk penguatan kapasitas warga agar tidak menjadi korban manipulasi informasi. Jika literasi digital hanya berhenti pada slogan, maka yang terjadi adalah *compliance mindset* sosial, yakni warga terlihat mengikuti kampanye literasi tetapi tidak benar-benar mengubah kebiasaan konsumsi informasi. Karena itu, literasi harus dihubungkan dengan praktik sehari-hari seperti verifikasi sumber, pembacaan lintas kanal, dan pemahaman insentif ekonomi di balik produksi konten.

Di sisi lain, penguatan ruang publik membutuhkan ekosistem media yang sehat, termasuk perlindungan kebebasan pers dan penguatan independensi redaksi. Jurnalisme investigasi tetap menjadi salah satu penyangga akuntabilitas paling penting, karena ia mampu menembus asimetri informasi yang sering ditutup oleh elite kekuasaan. Ketika ruang investigasi menyusut akibat tekanan ekonomi atau politik, publik kehilangan “mata” untuk melihat penyimpangan yang tidak tampak. Dengan demikian, literasi media dan regulasi bukan dua agenda terpisah, tetapi dua sisi dari upaya merawat demokrasi substantif.

Pada akhirnya, tujuan utama dari literasi dan regulasi adalah mengembalikan pemilu sebagai arena kompetisi program yang dapat diuji, bukan kompetisi pengaruh yang tidak terlihat. Media yang sehat seharusnya memperkecil asimetri informasi, membuka konflik kepentingan, dan mengurangi ruang *moral hazard* dengan memperluas pengawasan warga. Jika ini tercapai, maka pemilih tidak lagi menjadi sasaran, melainkan menjadi subjek politik yang aktif menuntut *kemenjawaban* dari kandidat dan institusi. Karena itu, Bab 8 menjadi penghubung penting menuju pembahasan Bab 9

BAB 9 Data, Teknologi, dan Oligarki Digital

“Ketika data menjadi mata uang politik, transparansi adalah satu-satunya cara menjaga kedaulatan pilihan warga.”

Transformasi digital telah mengubah pemilu menjadi arena kontestasi yang tidak lagi hanya berlangsung di panggung rapat umum, baliho, dan debat terbuka, tetapi juga di ruang-ruang algoritmik yang bergerak senyap. Dalam ruang digital, opini publik dibentuk melalui arsitektur platform, logika perhatian (*attention economy*), serta praktik pengumpulan data yang memungkinkan persuasi politik menjadi jauh lebih presisi. Situasi ini menimbulkan paradoks demokrasi modern: partisipasi warga tampak meningkat secara kuantitatif, tetapi kebebasan memilih dapat melemah secara kualitatif ketika informasi dan emosi dikelola oleh aktor bermodal besar. Karena itu, pembahasan oligarki pemilu pada era digital harus ditempatkan dalam kerangka *good governance* yang menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi sebagai syarat demokrasi yang sehat.

Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pengambil keputusan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sedangkan transparansi menuntut keterbukaan proses dan ketersediaan informasi yang

BAB 10 Politik Identitas, Polarisasi, dan Instrumentalisasi Isu

“Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.”
Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Pemilu dalam demokrasi idealnya menjadi arena adu gagasan tentang kesejahteraan, keadilan, dan masa depan bersama, namun dalam praktiknya sering berubah menjadi panggung kompetisi emosi yang mengeras. Di banyak kasus, isu identitas dipakai sebagai bahasa paling cepat untuk mengunci loyalitas pemilih, karena ia bekerja pada lapisan psikologis yang lebih dalam daripada argumentasi programatik. Ketika identitas diproduksi sebagai simbol “kami” versus “mereka”, ruang deliberasi publik mudah bergeser dari rasionalitas kebijakan menuju pertarungan moral yang menutup pintu dialog. Pada titik itulah oligarki politik menemukan jalur paling efektif untuk bertahan, sebab perhatian publik tersedot pada konflik horizontal, sementara negosiasi vertikal elite berlangsung tanpa sorotan memadai.

Bab ini menempatkan politik identitas dan polarisasi bukan sekadar sebagai gejala budaya atau residu sejarah, melainkan sebagai strategi yang dapat dikapitalisasi dalam kontestasi elektoral. Secara struktural, strategi tersebut sering bekerja bersamaan dengan asimetri informasi, konflik kepentingan, dan *moral hazard*

BAB 11 Dinasti Politik dan Oligarki Lokal

“Oligarki bertahan bukan karena pemilu tidak ada, tetapi karena kekayaan dapat terus ‘membela diri’ di dalam pemilu.”
(diadaptasi dari Winters, 2013)

Dinasti politik dan oligarki lokal adalah dua wajah dari persoalan yang sama: ketimpangan akses terhadap sumber daya kekuasaan dalam demokrasi elektoral. Dalam banyak kasus, pemilihan umum di tingkat daerah tidak sepenuhnya menjadi arena kompetisi setara, melainkan ruang yang mudah didominasi oleh aktor yang punya jaringan keluarga, modal ekonomi, dan kontrol institusi. Ketika relasi kuasa diikat oleh darah dan dikuatkan oleh uang, demokrasi tetap berjalan secara prosedural namun kehilangan esensi keterbukaannya. Bab ini membedah bagaimana dinasti politik tumbuh dari struktur lokal, bagaimana ia menyatu dengan oligarki, dan mengapa dampaknya terasa langsung pada layanan publik serta kualitas pemerintahan.

Secara konseptual, isu ini tidak bisa dipahami hanya sebagai soal “siapa menang pemilu”, tetapi harus ditarik ke akar tata kelola yang meliputi akuntabilitas dan transparansi sebagai kontrak sosial antara negara dan warga. Dalam kontrak tersebut, kekuasaan yang diberikan rakyat wajib dapat dipertanggungjawabkan secara

BAB 12 Institusi Negara dan Pembajakan Kebijakan

“Politics is who gets what, when, and how.” Harold D. Lasswell

Bab ini berangkat dari keyakinan bahwa oligarki tidak hanya bekerja melalui “uang” dan “mesin pemilu”, tetapi juga melalui jalur institusional yang lebih halus: aturan, birokrasi, anggaran, serta desain kebijakan publik. Ketika institusi negara seharusnya menjadi *wasit* yang menjaga fairness kompetisi, ia justru dapat berubah menjadi “arena transaksi” tempat pengaruh diperdagangkan, kebijakan dikunci, dan kepentingan publik disubordinasikan. Dalam acuan utama yang kita gunakan, akuntabilitas dan transparansi dijelaskan bukan sekadar urusan administratif menambah aturan, tetapi hasil interaksi dinamis bahkan konfliktual antara kekuatan-kekuatan yang berebut kontrol atas tata kelola.

Karena itu, pembajakan kebijakan perlu dibaca sebagai proses bertingkat, mulai dari tahap perumusan regulasi, proses pelaksanaan birokrasi, hingga pengendalian sumber daya publik melalui pengadaan dan politik anggaran. Titik kritisnya selalu sama: ketimpangan akses informasi, ketimpangan kapasitas, dan ketimpangan pengaruh yang membuat sebagian aktor mampu “menyetir” keputusan publik tanpa terlihat di permukaan. Kerangka bab ini menempatkan empat jalur utama pembajakan kebijakan

BAB 13 Hukum Pemilu, Pengawasan, dan Penegakan

“Wherever law ends, tyranny begins.” John Locke

Bab ini memetakan hukum pemilu, pengawasan, dan penegakan sebagai “tulang punggung” demokrasi elektoral, karena tanpa aturan yang dapat diawasi serta ditegakkan, pemilu mudah berubah menjadi ritual kompetisi yang hanya tampak prosedural. Dalam kerangka oligarki, hukum pemilu sering tidak runtuh secara terang-terangan, melainkan “dibengkokkan” melalui celah regulasi, permainan tafsir, dan ketimpangan sumber daya yang membuat arena persaingan tidak lagi setara. Di titik inilah konsep *akuntabilitas* dan *transparansi* menjadi relevan sebagai standar etik sekaligus standar tata kelola yang menuntut kekuasaan dapat diperiksa, dipertanggungjawabkan, dan tidak dikelola dalam ruang gelap. Logika ini sejalan dengan gagasan bahwa tata kelola publik yang kredibel harus bergerak dari kepatuhan administratif semata menuju kinerja yang bermakna bagi warga, yakni orientasi *value for money* dan kemampuan membuktikan manfaat kebijakan secara nyata.

Bab ini juga menempatkan lembaga pemilu, mekanisme sengketa, agenda antikorupsi, hingga pendekatan *evidence-based enforcement* dalam satu rangkaian yang saling mengunci, bukan

BAB 14 Perlawanan Demokratis: Civil Society dan Pengawasan Warga

“*Democracy dies in darkness.*” The Washington Post (motto redaksi)

Bab ini menempatkan perlawanan demokratis sebagai kerja kolektif warga untuk memulihkan kualitas pemilu dari dominasi oligarki, baik melalui pengawasan, pengetahuan, maupun keberanian membongkar jejaring kepentingan. Fokusnya bukan sekadar “mengkritik”, melainkan menyusun peta konsep, aktor, dan mekanisme yang membuat kontrol publik menjadi mungkin, terukur, dan berdampak. Kerangka bab ini menekankan bahwa demokrasi membutuhkan ekosistem pengimbang, dari pers investigatif hingga gerakan pemantau yang bekerja dengan standar etik dan metodologi. Arah pembahasannya mengikuti agenda bab 14 dalam kerangka naskah, yakni menghubungkan kekuatan warga dengan instrumen akuntabilitas yang konkret.

Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas tidak cukup dinilai dari keluaran yang terlihat rapi atau angka serapan anggaran yang tinggi, karena ukuran sesungguhnya adalah dampak yang dirasakan masyarakat. Dokumen rujukan menegaskan bahwa orientasi kinerja yang hanya mengejar *output* bisa menipu, sebab program bisa tampak berhasil tetapi tidak menyelesaikan masalah pada level

menuju pembuktian, dan dari keluhan menuju evaluasi yang terstruktur.

Dokumen rujukan menekankan bahwa transparansi tidak cukup hanya dengan mempublikasikan tumpukan dokumen tebal yang sulit dipahami, karena transparansi sejati menuntut informasi yang tepat waktu, komprehensif, dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Prinsip ini sangat relevan dalam pemilu, sebab banyak transaksi politik bersembunyi di balik kompleksitas administrasi yang sengaja dibuat rumit. Standar internasional seperti *Open Budget Survey* menggarisbawahi pentingnya dokumen kunci, termasuk versi anggaran warga (*Citizens Budget*) yang memang dirancang agar publik mampu membaca arah kebijakan. Karena itu, perjuangan transparansi bukan hanya soal “buka dokumen”, tetapi soal membuat dokumen itu benar-benar dapat dipakai warga untuk mengawasi.

Keterbukaan data juga perlu dipahami dalam kerangka akuntabilitas kinerja, sebab publik berhak menilai apakah belanja politik dan belanja publik menghasilkan dampak atau hanya menghasilkan angka administrasi. Konsep *Value for Money* yang menilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas memberi alat yang kuat untuk menguji klaim sukses yang sering diproduksi secara sepihak oleh elite. Dengan pendekatan ini, warga tidak mudah terjebak pada retorika pencapaian, karena yang diuji adalah kaitan antara input, output, dan outcome yang nyata. Di sini, *open data* menjadi prasyarat agar evaluasi warga dapat berdiri di atas bukti, bukan asumsi.

Akan tetapi, implementasi *open data* sering menghadapi tantangan kualitas data, hambatan akses, dan resistensi birokrasi, sehingga keterbukaan kadang dipakai sekadar sebagai kosmetik

BAB 15 Agenda Masa Depan: Mengurangi Cengkeraman Oligarki

dan  *“Demokrasi tidak berhenti pada bilik suara; demokrasi dimulai ketika warga mampu mengawasi uang, kekuasaan, kebijakan yang lahir setelah pemilu.”*

Bab ini menutup rangkaian analisis oligarki dalam pemilu dengan satu pertanyaan praktis yang paling penting: **apa yang harus dilakukan agar pemilu tidak terus menjadi mesin reproduksi ketimpangan kekuasaan.** Dalam banyak konteks, oligarki bertahan bukan karena demokrasi tidak ada, melainkan karena prosedur demokrasi berjalan di atas fondasi yang rapuh, terutama pada aspek pembiayaan politik, organisasi partai, dan ketahanan institusi pengawasan. Pada tahap inilah agenda masa depan harus dipahami sebagai agenda *policy engineering*, yakni merancang aturan, insentif, dan sistem yang mencegah transaksi gelap menjadi norma. Karena itu, bab ini tidak hanya berbicara tentang cita-cita, tetapi juga tentang peta jalan yang dapat diukur, diuji, dan dipertanggungjawabkan di ruang publik.

Mengurangi cengkeraman oligarki berarti **mengubah ekosistem** dari hulu ke hilir: dari cara partai merekrut kandidat, cara kampanye dibiayai, sampai cara kebijakan diawasi dan dievaluasi pasca pemilu. Prinsip akuntabilitas dan transparansi

Penutup

Pada akhirnya, persoalan utama dalam pemilu bukan hanya soal pelanggaran yang terlihat, melainkan juga soal struktur yang membuat ketimpangan terasa normal dan sulit ditantang. Oligarki tidak selalu bekerja dengan cara kasar, karena ia dapat hadir melalui aturan yang timpang, pembiayaan yang tidak transparan, pengaruh kebijakan, serta dominasi informasi yang membentuk persepsi publik. Ketika situasi ini dibiarkan, pemilu berisiko menjadi prosedur yang rutin, tetapi kehilangan daya koreksinya terhadap kekuasaan. Di titik inilah pembahasan buku ini menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar memilih, melainkan memastikan kekuasaan bisa diawasi, dipertanggungjawabkan, dan dibatasi.

Karena itu, agenda masa depan tidak cukup berhenti pada seruan moral, melainkan harus bergerak pada reformasi institusi, perbaikan sistem pembiayaan politik, penguatan pengawasan, serta perluasan literasi warga dalam membaca kerja kekuasaan. Upaya mengurangi cengkeraman oligarki membutuhkan kombinasi antara desain kebijakan yang tepat, keberanian penegakan hukum, dan kontrol publik yang konsisten. Jika transparansi dibuat operasional dan akuntabilitas benar-benar memiliki konsekuensi, maka ruang pembajakan dapat dipersempit secara nyata, bukan sekadar diperdebatkan. Dengan semangat itulah, buku ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah dan sosial untuk menjaga pemilu sebagai instrumen kedaulatan rakyat, bukan sekadar panggung kemenangan bagi mereka yang paling kuat sumber dayanya.

Daftar Pustaka

- Affandi, M. A. (2022). Participatory budgeting in Indonesia: From the policy innovation to the democracy innovation. *Jurnal Sains Manajemen*, 10(2).
- Al Amin, A. R. (2024). The political economy of buzzer actor network in the 2024 presidential election. *SARPASS: Journal of Social and Political Science*, 4(1).
- Al-Hamdi, R. (2024). Parties and the power of capital intensive under open-list proportional representation system: The case of Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 37(2), 150–165. <https://doi.org/10.20473/mkp.V37I22024.150-165>
- Appel, M., Prietzel, F., & Weber, S. (2022). The detection of political deepfakes. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 27(4), zmac008. <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmac008>
- Aspinall, E. (2014). When brokers betray: Clientelism, social networks, and electoral politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570.
- Aspinall, E. (2017). Vote buying in Indonesia: Candidate strategies, market logic and effectiveness. *Journal of East Asian Studies*, 17(2), 187–211.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.

- Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A. Z., Rubaidi, R., & Triantini, Z. E. (2017). Vote buying in Indonesia: Candidate strategies, market logic and effectiveness. *Journal of East Asian Studies*, 17(2), 187–211.
- Bär, D., *et al.* (2024). Systematic discrepancies in the delivery of political ads on social media: Implications for transparency and accountability. *Proceedings/PMC*.
- Birch, S. (2011). *Electoral malpractice*. Oxford University Press.
- Binns, R. (2018). Fairness in machine learning: Lessons from political philosophy. *Proceedings of Machine Learning Research*, 81, 149–159.
- Borgesius, F. J. Z., Trilling, D., Möller, J., Bodó, B., de Vreese, C. H., & Helberger, N. (2018). Online political microtargeting: Promises and threats for democracy. *Utrecht Law Review*, 14(1), 82–96.
- Bovens, M. A. P. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Cech, F., *et al.* (2021). Mechanisms for algorithmic accountability through the lens of actor and forum agency. *Technology in Society*, 67, 101725.
- Dal Bó, E. (2006). Regulatory capture: A review. *Oxford Review of Economic Policy*, 22(2), 203–225.
- d’Haenens, L., *et al.* (2022). Concentration of media ownership in Indonesia. *International Journal of Communication*.

- Dobber, T., Fathaigh, R. Ó., & de Vreese, C. H. (2023). Effects of an issue-based microtargeting campaign: A field experiment. *Communication Studies*, 74(1), 1–22.
- Effendi, E. (2023). Trading in influence (Indonesia): A critical study. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2231621.
- Fitriani, F., Hofman, B., & Kaiser, K. (2005). Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(1), 57–79.
- Fox, J. A. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice*, 17(4–5), 663–671.
- Fox, J. A. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? *World Development*, 72, 346–361.
- Fukuoka, Y. (2013). Oligarchy and democracy in post-Suharto Indonesia. *Political Studies Review*, 11(1), 52–64.
- Fung, A., Graham, M., & Weil, D. (2007). *Full disclosure: The perils and promise of transparency*. Cambridge University Press.
- Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives. *Development and Change*, 35(4), 697–718.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 33–52.

- Hyde, S. D. (2011). Catch us if you can: Election monitoring and international norm diffusion. *American Journal of Political Science*, 55(2), 356–369.
- Indiahono, D. (2022). Dynamics of bureaucratic neutrality policy in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 18(3), 309–320. <https://doi.org/10.2428/jba.v18i3.1104>
- James, T. S. (2012). Electoral management and the institutional design of electoral dispute resolution: Lessons from sub-Saharan Africa. *Democratization*, 19(4), 779–799.
- Jati, W. R. (2022). Polarization of Indonesian society during 2014–2020: Causes and its impacts toward democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.22146/jsp.66057>
- Jupriyadi, J. (2023). In the absence of trading in influence in anti-corruption laws: Strengthening Indonesia's legal framework based on UNCAC. *Lex Publica*.
- Kabullah, M. I., Amsari, F., Arifin, W., & Misra, F. (2020). Accountability dysfunction in campaign finance regulations: A case study of the 2018 Jambi simultaneous general elections. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 225–236. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.225-236>
- Katz, R. S., & Mair, P. (2009). The cartel party thesis: A restatement. *Perspectives on Politics*, 7(4), 753–766.
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). Citizen–politician linkages: An introduction. In H. Kitschelt & S. I. Wilkinson (Eds.), *Patrons, clients and policies: Patterns of democratic accountability and political competition* (pp. 1–49). Cambridge University Press.

- Kolstad, I., & Wiig, A. (2009). Is transparency the key to reducing corruption in resource-rich countries? *World Development*, 37(3), 521–532.
- Krueger, A. O. (1974). The political economy of the rent-seeking society. *American Economic Review*, 64(3), 291–303.
- Kusumaningrum, D. N., & Sulistyaningsih, T. (2022). The internalization of nationalism and Pancasila for teenager as the value to living in the era of digital transformation. *Journal of Community Service and Empowerment*, 3(2).
- Kuwoto, A. D. (2024). Pengaruh kampanye digital terhadap literasi politik pemilih muda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22(1), 55–72.
- Leone de Castris, A. (2024). Types of platform transparency: An analysis of discourse around transparency and global digital platforms. *Public Integrity*, 1–15. <https://doi.org/10.1080/10999922.2024.2304741>
- Lindstedt, C., & Naurin, D. (2010). Transparency is not enough: Making transparency effective in reducing corruption. *International Political Science Review*, 31(3), 301–322.
- Lnenicka, M. (2021). The role of open government data in public governance. *Government Information Quarterly*, 38(1).
- Maftuh, M. A. (2020). Parliamentary threshold in constitutional election in 2019 (Philosophical review of the principles of people sovereignty). *JIL: Journal of Indonesian Law*, 1(2), 200–213. <https://doi.org/10.18326/jil.v1i2.200-213>
- Maia, C. M. (2023). *Akuntabilitas dan transparansi sektor publik di Indonesia*.

- Mietzner, M. (2015). Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 47(4), 587–610.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist mobilisation in Indonesia: Religious intolerance, militant groups and the politics of accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3), 479–497.
<https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>
- Miqdad, M. (2024). Buzzer politik dan pengembangan opini di media sosial di Indonesia. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Musa, N. I. (2023). Investigative journalism and anti-corruption accountability: A comparative analysis. *Journal of Media Ethics*, 38(2), 104–118.
- Najati, N. P. (2021). Transparency of campaign finance disclosure for achieving accountable election: The challenges and impacts. *Jurnal Jurisprudence*, 11(1), 68–81.
- Nichter, S. (2008). Vote buying or turnout buying? Machine politics and the secret ballot. *American Political Science Review*, 102(1), 19–31.
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.
- Nurmansyah, A. (2025). Civil society election monitoring and democratic accountability: Evidence from local elections. *Journal of Governance and Local Politics*, 7(1), 1–18.
- Obar, J. A., & Oeldorf-Hirsch, A. (2018). The clickwrap: A political economic mechanism for manufacturing consent on social media. *Social Media + Society*, 4(3).

- Pepinsky, T. B. (2009). *Economic crises and the breakdown of authoritarian regimes: Indonesia and Malaysia in comparative perspective*. Cambridge University Press.
- Pradana, A. W. (2022). Promoting participatory budgeting practices in Indonesia: Lessons from Malang City. *Policy & Governance Review*, 6(3), 297–313. <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i3.613>
- Puspita, A. C., & Gultom, Y. M. L. (2024). The effect of e-procurement policy on corruption in government procurement: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 47(2), 117–129. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2093900>
- Qodir, Z. (2022). Political polarization in West Kalimantan. *Studia Islamika*.
- Rahat, G., & Hazan, R. Y. (2001). Candidate selection methods: An analytical framework. *Party Politics*, 7(3), 297–322.
- Rahmawati, R. (2023). Media ownership and democracy processes in Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik (BRIN)*.
- Ryu, S., & Virindra, N. (2023). Impaired neutrality: A propensity that occurs among Indonesian bureaucrats in the election. *Policy & Governance Review*, 7(1), 38–53. <https://doi.org/10.30589/pgr.v7i1.622>
- Sarnawa, B. (2024). General elections, neutrality, and state civil apparatus: The regulation and its challenges in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*.
- Scarrow, S. E. (2015). Political parties and their money: Business as usual? *Annual Review of Political Science*, 18, 421–438.

- Schäwel, J., *et al.* (2021). Political microtargeting and online privacy: A theoretical approach to understanding users' privacy behaviors. *Media and Communication*, 9(4), 83–95.
- Simatupang, K. H. (2025). Multi-party systems and parliamentary thresholds: The case of Indonesia's presidential system with comparisons to Germany and Taiwan. *Journal of Political Issues*, 6(2), 99–109. <https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.291>
- Slater, D. (2004). Indonesia's accountability trap: Party cartels and presidential power after democratic transition. *Indonesia*, 78, 61–92.
- Soderborg, S., & Muhtadi, B. (2023). Resentment and polarization in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 23(3), 439–467. <https://doi.org/10.1017/jea.2023.17>
- Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21.
- Stokes, S. C. (2005). Perverse accountability: A formal model of machine politics with evidence from Argentina. *American Political Science Review*, 99(3), 315–325.
- Subekti, D., Yusuf, M., Saadah, M., & Wahid, M. (2025). Social media and disinformation for candidates: The evidence in the 2024 Indonesian presidential election. *Frontiers in Political Science*, 7, 1625535. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1625535>
- Suardi, I., Rossieta, H., Djakman, C. D., & Diyanty, V. (2024). Procurement governance in reducing corruption in the Indonesian public sector: A mixed method approach. *Cogent*

- Social Sciences*, 10(1), 2393744.
<https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2393744>
- Suci, P., & Suri, I. (2024). Analyzing the electoral reform journey of Indonesia from 2004–2023: Value demands or power needs? *Politica*, 15(2), 167–184.
<https://doi.org/10.22212/jp.v15i2.4459>
- Suharto, T. (2023). Deliberative participation and democratic resilience in emerging democracies. *Journal of Political Studies*, 30(2), 201–219.
- Tomsa, D., & Ufen, A. (2013). Party politics in post-Suharto Indonesia: The continuing relevance of old cleavages. *Contemporary Southeast Asia*, 35(2), 1–24.
- Tullock, G. (1967). The welfare costs of tariffs, monopolies, and theft. *Economic Inquiry*, 5(3), 224–232.
- Utami, B. (2025). Polarization in reporting the 2019 presidential election campaign: Evidence from Indonesian television news. *Cogent Social Sciences*.
- Ufen, A. (2008). From *aliran* to dealignment: Political parties in post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, 16(1), 5–41.
- van Biezen, I., & Kopecký, P. (2014). The cartel party and the state: Party-state linkages in European democracies. *Party Politics*, 20(2), 170–182.
- Wantu, F. M. (2024). Pendidikan politik warga dan etika pemilihan dalam memperkuat demokrasi elektoral. *Jurnal Civic Education*, 8(2), 133–147.

- Warburton, E., & Aspinall, E. (2024). Private power and public office: The rise of business politicians in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 56(2), 184–206.
<https://doi.org/10.1080/14672715.2024.2334069>
- Weeks, B. E. (2015). Emotions, partisanship, and misperceptions: How anger and anxiety moderate susceptibility to political misinformation. *Journal of Communication*.
- Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, 96, 99–123.
<https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0099>
- Yadav, V. (2011). Political parties, business groups, and corruption: How private sector participation affects governance. *Comparative Political Studies*, 44(10), 1294–1323.

Profil Penulis



Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si., lahir di Dili pada 4 November 1974, sebagai putra dari Manuel Maia (+) dan Fernanda Maia (+). Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan pengabdian. Ia menikah dengan Romana Christiana Boy dan dikaruniai dua orang anak, Dirgatama Manuel Maia dan Maria Fernanda Maia, yang menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan hidup dan pengabdianya.

Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri 9 Dili dan diselesaikan pada tahun 1988. Ia melanjutkan ke SMP Katolik Paulus VI Dili hingga lulus pada tahun 1991, kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Dili pada tahun 1994. Sejak masa sekolah, bakat kepemimpinan dan ketekunannya telah tampak melalui berbagai aktivitas organisasi dan kepemudaan yang diikutinya.

Minatnya pada bidang sosial membawanya melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, Jurusan Ilmu Pekerjaan Sosial, dan meraih gelar Ahli Kesejahteraan Sosial (AKS) pada tahun 1998. Ia kemudian memperdalam kajian sosiologi dengan menempuh Program Magister Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang dan memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) pada tahun 2004. Puncak capaian akademiknya diraih pada tahun 2020 dengan gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Ilmu Administrasi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Latar belakang

akademik ini membentuk fondasi kuat bagi pemikirannya dalam bidang administrasi publik, kebijakan, dan pembangunan sosial.

Sejak usia muda, Dr. Carlos aktif dalam berbagai organisasi. Ia terlibat dalam Gerakan Pramuka dari jenjang Siaga hingga Penegak Saka Dirgantara di Dili (1984–1999). Kepemimpinannya terasah ketika menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Katolik Paulus VI (1989–1991) serta menjadi anggota dan pengurus OSIS SMA Negeri 2 Dili (1992–1993). Ia juga aktif dalam dunia bela diri melalui Perguruan Pencak Silat Padjadjaran (1991–1994) dan kemudian Tarung Derajat sejak 1994 hingga kini. Pengalaman ini memperkaya karakter kepemimpinan, ketegasan, serta daya juangnya.

Berbagai capaian penting turut mewarnai perjalanan organisasinya. Pada tahun 1991, ia menjadi peserta Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta, sebagai Pratama Kontingen Timor Timur. Tahun 1993, ia terpilih sebagai Paskibraka Nasional dan dipercaya menjabat Lurah Putera Desa Bahagia serta Komandan Kelompok 17 Pagi di Istana Negara, Jakarta. Dalam bidang olahraga bela diri, ia pernah menjadi pelatih Tarung Derajat untuk Kontingen Timor Leste pada SEA Games XXVI tahun 2011 di Jakarta–Palembang, serta pelatih Kontingen Nusa Tenggara Timur pada Kejuaraan Nasional Piala Presiden IV tahun 2013 di Bandung. Keseluruhan pengalaman ini mencerminkan integritas, dedikasi, dan konsistensi dalam pengabdian.

Dalam ranah profesional, Dr. Carlos mengabdikan diri sebagai dosen tidak tetap sejak tahun 1999 di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Kupang dan Malang. Selain itu, sejak tahun 2007 ia juga menekuni dunia kewirausahaan, khususnya di sektor

pariwisata dan perdagangan, sebagai wujud kemandirian dan kontribusi nyata terhadap pengembangan ekonomi.

Sebagai akademisi produktif, ia telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang membahas pendidikan, administrasi publik, kebijakan, demokrasi, pembangunan daerah, hingga tata kelola pemerintahan dan korporasi di era digital. Karya-karyanya merefleksikan konsistensi pemikiran yang kritis dan konstruktif terhadap dinamika perubahan sosial-politik kontemporer. Melalui buku-bukunya, ia mendorong inovasi pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat marjinal, serta pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

Perjalanan akademik, pengalaman organisasi, serta kiprah profesional yang luas menjadikan Dr. Carlos Manuel Maia sebagai figur akademisi-praktisi yang utuh. Ia tidak hanya bergiat dalam ranah konseptual, tetapi juga terlibat langsung dalam implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat. Dedikasinya terhadap pendidikan, administrasi publik, dan kesejahteraan sosial menghadirkan teladan tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat bersinergi dengan tindakan nyata demi kemajuan masyarakat.

OLIGARKI POLITIK

DALAM PEMILU

Buku Oligarki Politik dalam Pemilu mengajak pembaca melihat pemilu bukan sekadar persaingan kandidat, melainkan arena tempat modal, jaringan partai, dan kontrol informasi bekerja membentuk hasil demokrasi. Buku ini menelusuri mekanisme bagaimana oligarki tetap dominan melalui jalur yang tampak legal, terutama lewat tingginya biaya politik yang membuat rekrutmen kandidat lebih ditentukan kemampuan membiayai ketimbang kapasitas kepemimpinan. Akibatnya, jabatan mudah diperlakukan sebagai investasi yang harus “kembali modal” setelah menang.

Buku ini juga membedah cara oligarki mengunci pemilu melalui politik uang, klientelisme, dan mesin lapangan yang membangun pasar suara serta memengaruhi arah kebijakan publik. Namun pembahasannya tidak berhenti pada kritik: buku ini menawarkan arah perbaikan yang realistis melalui transparansi pendanaan, audit yang kuat, sanksi konsisten, dan pengawasan publik. Pada akhirnya, pembaca diajak menuntut pemilu yang bukan hanya sah secara prosedur, tetapi juga adil secara substansi.